

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Era Reformasi yang muncul di Indonesia pasca tumbanganya Orde Baru 1998, dengan jargon sistem demokrasi, dimana sistem yang mengakui penuh hak bicara dan berpendapat masyarakatnya. Hak bicara dan berpendapat ini berlaku bagi seluruh masyarakat tanpa memandang asal, jabatan, profesi, pangkat, jenis kelamin, maupun golongan. Kesemuanya tersebut dapat mengaplikasikan pemikirannya dengan menggunakan sarana apapun, kapanpun dan dimanapun, termasuk untuk mendirikan perkumpulan, kelompok maupun organisasi dan sejenisnya, asalkan tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia Bab XA tentang Hak Asasi Manusia mulai Pasal 28A sampai 28J ke semua dari isi Pasal-Pasal tersebut menggunakan kata “Setiap Orang”, maka kemudian seharusnya tidak ada pengucilan, peminggiran, pendiskriminasian, ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu. Jadi “Setiap Orang” ini bisa berbuat apapun, baik secara individu maupun berkelompok asalkan tidak bertentangan dengan apa yang diamanatkan setiap isi Pasal yang tercantum dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia tersebut dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku di setiap penjuru pelosok Negeri ini tanpa terkecuali, sehingga

diharuskan setiap daerah mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai ke Desa-Desa wajib membuatkan kebijakan turunan yang mana tidak bertentangan dengan apa yang tercantum dalam UUD'45 tersebut, serta wajib memperhatikan, mengimplementasikan serta melakukan pengawasan terhadap kesemuanya agar tidak terjadi peyelewengan dan pelanggaran. Namun sejauh pelaksanaannya, tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadinya ketidaksesuaian dengan apa yang tercantum dalam UUD'45 tersebut, maka dari itu Hak Asasi Perempuan sebagaimana tercantum dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan kemudian diratifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Inpres No. 9 Tahun 2000, yang kemudian ditindaklanjuti oleh menteri dalam negeri dengan mengeluarkan Kepmendagri No. 132 Tahun 2003 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

Dalam Era Reformasi dengan sistem demokrasi ini, maka menjadi strategis dan pentinglah suara rakyat tersebut. Karena asas dasar sistem demokrasi yaitu sebuah sistem pengelolaan negara yang menekankan pada kekuasaan atau kedaulatan negara di tangan rakyat. Dengan hakikat demokrasi, yaitu (1) *government of the people* (pemerintahan dari rakyat), (2) *government by the people* (pemerintahan oleh rakyat), dan (3) *government for the people* (pemerintahan untuk rakyat).<sup>1</sup> Suara-suara tersebut akan memiliki arti dan makna yang lebih jika dapat dibulatkan, digabungkan serta terakomodir dengan baik yaitu salah satunya melalui perkumpulan-

---

<sup>1</sup> Ignas Kleden. *Melacak Akar Konsep Demokrasi*. dalam Ahmad Suaedy (Ed.). *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi*. Yogyakarta: LKIS. 2000. Hal. 5.

perkumpulan, kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi serta bentuk-bentuk lainnya.

Salah satu wujud nyata demokrasi yaitu diadakannya Pemilihan Umum (Pemilu), mulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sampai pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik ditingkat Provinsi (Gubernur) hingga tingkat Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) dan juga pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mulai dari DPR-RI sampai DPRD (Provinsi sampai Kabupaten/Kota) kesemuanya dipilih melalui Pemilu secara Periodik. *Moment* Pemilu, baik Pilpres, Pemilukada sampai pada Pemilu Legislatif (DPR, DPRD dan DPD), salah satunya dapat “dimanfaatkan” oleh kelompok, perkumpulan maupun organisasi dalam mewujudkan aspirasi-aspirasi rakyat.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat penting dan strategis. Peran penting dan strategis ini yaitu dalam rangka pengembangan dan kemajuan kehidupan berdemokrasi, berkeadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat serta menciptakan, memelihara dan mempertahankan hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah serta antar Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia, dengan total jumlah penduduk 237.556.363 orang, berdasarkan hasil sensus tahun 2010 yang terbagi kedalam 33 Provinsi, 398

Kabupaten, 93 Kota, 1 Kabupaten Administrasi dan 5 Kota Administrasi,<sup>2</sup> dengan berbagai suku, adat istiadat, bahasa, agama, dan budaya yang kemudian banyak menimbulkan kejadian yang unik dan menarik dari penyelenggaraan Pemilu. Walaupun demikian satu hal yang sama adalah dimana kesemua tujuannya demi mencari perhatian, mendapatkan simpati sehingga dapat merebut suara rakyat agar dapat memenangkan pasangan-pasangan calon pimpinan daerah yang sedang *berkontes* dalam Pemilu.

Begitupun Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Registrasi penduduk pertengahan tahun 2010, sebanyak 486.151 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 239.967 jiwa (49,15%) dan perempuan sebanyak 247.184 jiwa (50,85%). Sex ratio laki-laki : perempuan adalah 97. sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 138.480 KK. Rata-rata penghuni Rumah tangga sebanyak 4 jiwa.<sup>3</sup> Dengan jumlah pemilih yang tercatat dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kulon Progo tahun 2011 adalah 470.520 orang, terdiri dari 231.672 laki-laki, 238.848 perempuan, dengan 136.119 Kepala Keluarga (KK).<sup>4</sup> Maka dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Kulon Progo adalah perempuan. Namun sangat disayangkan pendorongan itu hanya dalam segi kuantitas semata, karena dalam kehidupan, khususnya dalam dunia perpolitikan keterlibatan perempuan masih lemah dan aspirasi perempuan masih belum begitu

---

<sup>2</sup> Sensus Penduduk Tahun 2010.

<sup>3</sup> *Profil Kesehatan Kabupaten Kulon Progo*, dikutip tanggal 18 Desember 2011, dari : <http://www.dinkes.kulonprogokab.go.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=79>.

<sup>4</sup> *Bupati Kulon Progo Serahkan DP4 Ke KPU*, dikutip tanggal 28 Oktober 2011, dari : <http://www.kulonprogokab.go.id/v2/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=1354>.

diperhitungkan. Sehingga membuat masih banyaknya kebijakan-kebijakan yang belum memihak pada perempuan.

Lemahnya posisi perempuan dalam kancah politik tersebut tidak terlepas juga dari masih rendahnya kesadaran perempuan terlibat dalam politik itu sendiri. Ini terlihat dari masih sedikitnya perwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Prosedur yang berbelit-belit, susah dan masih rendahnya tingkat kepercayaan Partai Politik terhadap perempuan (bagi yang mencalonkan diri melalui Parpol) sampai pada masih rendahnya kepercayaan masyarakat serta sikap skeptis masyarakat terhadap perempuan jika menjadi pemimpin juga menambah panjang daftar lemahnya posisi perempuan dalam dunia politik. Hal itu juga tergambar jelas dalam anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo periode 2009-2014 dengan jumlah total sebanyak 40 orang hanya 5 orang atau 12,55 persen perempuan.<sup>5</sup> Begitu pun pada Pemilukada Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 yang lalu, dari 4 (empat) kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati hanya 1 (satu) pasangan calon perwakilan dari perempuan, itupun hanya sebagai calon wakil bupati, walaupun pada akhirnya pasangan tersebut juga tidak berhasil menang dalam “pertarungan” Pemilukada.

Ilustrasi diatas seakan-akan menggambarkan masih sangat lemahnya posisi tawar (*bargaining position*) perempuan dalam kancah politik, Khususnya dalam Pemilukada. Masih sedikitnya perwakilan perempuan dilembaga politik dan lemahnya posisi perempuan dalam dunia politik ini

---

<sup>5</sup>*Rendahnya Keterlibatan Perempuan Dalam Politik*, dikutip tanggal 18 Desember 2011, dari : <http://kulonprogonews.wordpress.com/2011/01/26/keterlibatan-perempuan-dalam-politik-rendah/>.

membuat banyaknya kebijakan-kebijakan dan program-program yang belum berpihak pada kaum perempuan.

Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo adalah terus meningkatnya dari tahun ke tahun angka pernikahan dini. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan pernikahan dini di daerah ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan drastis. Kasubid Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (PMPDP dan KB) Kabupaten Kulon progo, Mardiya, mengatakan, berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama Kulon Progo menyebutkan jumlah pernikahan dini pada 2006 baru berjumlah 19 kasus, pada 2007 berjumlah 41 kasus, 69 kasus pada 2008, 84 kasus pada 2009 dan 2010 diperkirakan masih bertambah jumlahnya. "Pernikahan yang dimaksud adalah pasangan nikah yang perempuan di bawah 16 tahun sedangkan laki-laki di bawah 19 tahun. Dan kasus pernikahan dini di Kulon Progo dari tahun ke tahun mengalami tren peningkatan yang sangat serius. jumlah pasangan yang menikah karena hamil di luar nikah juga terus mengalami peningkatan. "Jumlah pasangan yang menikah karena hamil pada 2006 mencapai 9,9 persen, 2007 meningkat

menjadi 13,32 persen, 2008 kembali turun menjadi 10,24 persen tapi pada 2009 malah mengalami tren peningkatan tajam mencapai 13,45 persen.<sup>6</sup>

Kasus pernikahan dini ini disusul dengan terus merangkak naik kasus angka melahirkan bagi perempuan di bawah umur di Kabupaten Kulon Progo. Dokter spesialis anak RSUD Wates, dr. Lies Indriyati, SpA mengatakan, bahwa angka persalinan perempuan di bawah usia 20 tahun cenderung meningkat. Pada 2009 tercatat mencapai 95 orang dan meningkat menjadi 111 orang pada 2011. Padahal tahun-tahun sebelumnya selalu di bawah 50 kasus.<sup>7</sup>

Belum lagi ditambah dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kulon Progo. Menurut Kepala Bidang Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (PK2PA) Kantor Pemberdayaan Perempuan, Kabupaten Kulon Progo, Siti Muqodimah, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kulon Progo selama Januari hingga September 2010 cukup banyak mencapai 34 kasus. Bahkan untuk dampingan medis mencapai 16 orang, jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 10 kasus. Sedangkan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kulon Progo yang sudah masuk ranah hukum dan ditangani oleh Polres Kulon Progo mencapai 18 kasus dari Januari hingga September, tapi jumlah ini masih dapat bertambah mengingat banyaknya kasus yang ditangani Polsek yang belum masuk datanya. Kasus

---

<sup>6</sup> Krisman Purwoko. 2010. *Pernikahan Dini di Kulon Progo Meningkat Drastis*, dikutip tanggal 30 Desember 2011, dari : <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/10/11/24/148421-pernikahan-dini-di-kulon-progo-meningkat-drastis>.

<sup>7</sup> *Melahirkan di Bawah Umur Naik*. dikutip tanggal 17 Januari 2012, dari : <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/411171/>.

kekerasan terhadap perempuan dan anak serta KDRT ini tersebar merata di 12 wilayah Kecamatan, di Kabupaten Kulon Progo.<sup>8</sup>

Namun, jika kaum perempuan menyadari bahwa sesungguhnya mereka memiliki daya tawar (*bargaining power*) yang potensial dalam PemiluKada untuk mempengaruhi pembuatan visi, misi dan program kerja masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan kuantitas yang melebihi kaum laki-laki tersebut, maka tidak dipungkiri dengan demikian dapat terwujudnya semua keberpihakan, persamaan, kesejahteraan dan keadilan terhadap perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh Dian Eka Rahmawati : “Setidaknya ada tiga isu strategis yang harus didesakkan ke dalam program kerja calon kepala daerah, yakni penyusunan anggaran daerah berperspektif gender; pengarusutamaan gender dalam tata kelola pemerintahan secara progresif serta pemenuhan target indikator MDG’s (*Millenium Development Goals*) yang menyentuh langsung kebutuhan dan kesejahteraan perempuan seperti kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial”.<sup>9</sup>

Penghimpunan maupun pengintegrasian serta pengartikulasian kepentingan tersebut salah satunya bisa dilakukan dengan menyatunya kaum perempuan di Kabupaten Kulon Progo dengan membentuk suatu kelompok, perkumpulan maupun organisasi. Dimana segala bentuk upaya, gerakan, aksi, maupun kegiatan dari kelompok, perkumpulan atau organisasi akan lebih kuat

---

<sup>8</sup> Alan Nazarjati. 2010. “Kasus Kekerasan Perempuan di Kulon Progo Tinggi”. Dikutip tanggal 2 Januari 2012, dari : <http://alan-nazarjati.blogspot.com/2010/10/kasus-kekerasan-perempuan-di-kulonprogo.html>.

<sup>9</sup> Perempuan dan Komoditas Politik (dimuat pada Harian Jogja, 15 Juni 2011).

posisinya dan akan lebih diprioritaskan apabila dibandingkan dengan gerakan perseorangan atau individu.

Bangkitnya kembali perempuan berorganisasi di Kabupaten Kulon Progo setelah pengekanan pada masa Orde Baru lalu bisa dibilang masih tergolong baru, yaitu baru sekitar tahun 2006 mulai terlihat gerakan-gerakan dan keaktifan kembali perempuan di Kulon Progo untuk mulai berkumpul, berkelompok dan berorganisasi dengan didasari atas keprihatinan kaum perempuan terhadap masalah yang dialami oleh perempuan yaitu dalam rangka melawan ketertindasan, ketidakadilan, ketimpangan, kekerasan, kesewenangan, subordinasi maupun bentuk-bentuk lainnya yang sejenis. Demi cita-cita luhur membangun bangsa ini agar makmur, aman dan sejahtera dengan memberikan kesempatan kepada siapapun tanpa membedakanya. Sekitar tahun 2003 didirikannya sayap khusus perempuan DPC PDIP Kulon Progo dengan nama Srikandi Binangun dalam menyongsong Pilkada Kulon Progo pada waktu itu. Namun pada tahun 2010 berdasarkan Amanat Kongres Ketiga PDIP maka Srikandi Binangun kemudian diganti namanya menjadi Srikandi Demokrasi (SRI DEM) dan diresmikan menjadi sayap partai secara nasional<sup>10</sup>. Kemudian pada tahun berikutnya berdiri Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Kulon Progo<sup>11</sup>. Pada tahun 2008 berbagai Jaringan Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo juga meleburkan diri menjadi JMKP (Jaringan Masyarakat Kulon Progo)<sup>12</sup> dan yang terbaru

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bu Esti Sekretaris Srikandi Demokrasi (Sridem) dan Pak Tony Ketua DPC PDIP Kulon Progo Kamis 15 Maret 2012.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bu Ghoniyatun Sekcab KPI Kulon Progo Senin 13 Februari 2012.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bu Rusmiyatun Ketua JMKP Senin 13 Februari 2012.

adalah berdirinya perkumpulan Serikat Perempuan Independen (SPI) Kulon Progo pada pertengahan tahun 2010<sup>13</sup>.

Banyak organisasi perempuan di Kabupaten Kulon Progo yang konsen terhadap permasalahan-permasalahan, ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan-ketidakadilan yang dialami kaum perempuan di Kabupaten Kulon Progo, baik dalam bidang sosial, budaya, hukum, ekonomi maupun politik serta lingkungan hidup. Maka dari itu perlu peran aktif perempuan melalui wadah perkumpulan atau organisasi untuk segera menyelesaikan semua permasalahan, ketimpangan maupun ketidakadilan tersebut, mengingat bahwa hanya perempuanlah yang bisa menyelesaikan persoalan perempuan dengan lebih baik karena pengalamannya sebagai perempuan.

Dalam Pemilu Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 lalu sudah banyak organisasi perempuan yang terlibat maupun melibatkan diri, baik terlibat dan melibatkan diri secara langsung maupun tidak langsung, seperti; KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Cabang Kulon Progo, JMKP (Jaringan Masyarakat Kulon Progo), SPI (Serikat Perempuan Independen) Kulon Progo, organisasi-organisasi dari sayap-sayap Partai Politik, Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kulon Progo dan organisasi-organisasi perempuan lainnya. Ini membuktikan keaktifan perempuan dalam menampung aspirasi dari kaum perempuan agar terlaksananya transformasi dan pengarusutamaan gender demi terciptanya keadilan dan kesetaraan gender baik dibidang sosial, budaya, hukum, ekonomi, politik serta lingkungan hidup lainnya.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Mbak Ari Purjantati Sekretaris SPI Kulon Progo Senin 20 Februari 2012

Maka dari itu penulis ingin meneliti tentang upaya yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sekretariat Cabang Kulon Progo dan Srikandi Demokrasi (SRI DEM) PDIP Kulon Progo dalam mengartikulasikan kepentingan perempuan untuk mempengaruhi Visi dan Misi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemiluada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga terciptanya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) serta kesejahteraan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas maka dapat diajukan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sekretariat Cabang Kulon Progo dan Srikandi Demokrasi (SRI DEM) PDIP Kulon Progo mengartikulasikan kepentingan perempuan dalam Pemiluada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 ?*
- 2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap upaya Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sekretariat Cabang Kulon Progo dan Srikandi Demokrasi (SRI DEM) PDIP Kulon Progo mengartikulasikan kepentingan perempuan dalam Pemiluada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 ?*

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sekretariat Cabang Kulon Progo dan Srikandi Demokrasi (SRI DEM) PDIP Kulon Progo mengartikulasikan

kepentingan perempuan dalam Pemilukada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap upaya yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sekretariat Cabang Kulon Progo dan Srikandi Demokrasi (SRI DEM) PDIP Kulon Progo mengartikulasikan kepentingan perempuan dalam Pemilukada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis dapat memberikan tambahan sumbangan pengetahuan bagi bidang Ilmu Pemerintahan dalam bidang dinamika penyelenggaraan Pemilukada dan Organisasi Perempuan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbang saran bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kulon Progo dalam penyelenggaraan Pemilukada selanjutnya.
3. Untuk penulis sendiri agar dapat meningkatkan kemampuan dalam membuat karya tulis ilmiah.
4. Penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan dari teori-teori politik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis yaitu teori tentang gender, organisasi perempuan dan gerakan perempuan, serta proses politik di Indonesia khususnya mengenai pelaksanaan Pemilukada sehingga karya tulis ini dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi kalangan civitas akademika yang mempunyai pusat penelitian dibidang terkait.

#### **E. Kerangka Dasar Teori**

Kerangka teori adalah teori-teori yang digunakan dalam penelitian sehingga aktifitas penelitian menjadi jelas, sistematis dan ilmiah.

##### **Menurut Masri Singarimbun**

**“Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, proposisi yang menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep”.**<sup>14</sup>

##### **Menurut Koentjaraningrat**

**“Teori adalah merupakan pernyataan mengenai sebab akibat dan mengenai adanya sesuatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dengan satu atau beberapa faktor tertentu saja”.**<sup>15</sup>

Dengan kata lain teori adalah merupakan saranan untuk menyatukan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun fenomena alam sehingga dapat dikaji, diteliti dan dipelajari. Adapun yang akan diteliti sebagai kerangka dasar teori dalam penelitian ini adalah **Organisasi Perempuan dan Gerakan Perempuan, Artikulasi Kepentingan Perempuan, dan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung**. Definisi ketiga kerangka teori tersebut sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi. *“Metode Penelitian Surfey”*. LP3ES. Jakarta. 1989. Hal.39.

<sup>15</sup> Koentjaraningrat. *“Metode Penelitian Masyarakat”*. Jakarta : PT. Gramedia. 1998. Hal. 11.

## 1. Organisasi Perempuan dan Gerakan Perempuan

Kaum perempuan diseluruh dunia telah menyadari mengenai ketimpangan gender yang dialami oleh mereka. Pada saat yang bersamaan mulai banyak ditemui gerakan-gerakan kaum perempuan untuk mewujudkan 'keadilan' antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Gerakan-gerakan kaum perempuan ini dilakukan dengan cara mendirikan berbagai kelompok, perkumpulan maupun organisasi demi terartikulasinya semua kepentingan perempuan baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Namun, tak dipungkiri bahwa organisasi tersebut muncul dari permasalahan yang dihadapi dan diungkapkan oleh seseorang perempuan maupun beberapa perempuan yang sadar akan ketertindasan yang dialaminya. Kaum perempuan diseluruh dunia sedang berorganisasi; dan berbagai lembaga dana juga berusaha mendanai organisasi perempuan yang efektif.

Di seluruh dunia kerja perempuan dinilai rendah. Bahkan banyak rumah tangga "yang dijaga perempuan" (*women-maintained*) sebagai ganti istilah "yang dikepalai perempuan" (*women-headed*) yang lebih lazim, dimaksudkan untuk menegaskan kenyataan bahwa, walaupun banyak perempuan memikul tanggung jawab tunggal menghidupi keluarganya, mereka jarang menerima pengakuan, hak dan kekuasaan yang sama seperti kepala keluarga laki-laki. Rumah tangga yang dijaga perempuan ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti di Asia, soal janda menjadi penyebab utama. Kebanyakan rumah tangga setelah terjadinya

perceraian, semua anak-anak menjadi tanggung jawab penuh kepada ibu mereka. Sedangkan di Afrika belahan Selatan dan Utara serta Timur Tengah, migrasi lebih sering menjadi penyebabnya. Di banyak kawasan dipedesaan Afrika, suami sangat sering tidak ada di tempat untuk waktu yang lama. Migrasi internal (di mana laki-laki pergi mencari kerja ke kota) dan migrasi yang menyeberang batas nasional adalah penyebab utama. Migrasi musiman tersebut seringkali selama 12 sampai 15 bulan. Bahkan hukum Afrika Selatan secara khusus melarang istri dan anak pekerja migran menyertai suaminya. Sehingga perempuan yang menanggung secara tunggal beban penuh rumah tangganya selama suami mereka migrasi.

Di seluruh dunia, Utara dan Selatan, rumah tangga yang dijaga perempuan secara tidak proposional diwakili antarsektor termiskin dalam masyarakat. Karena kegiatan ekonomi harus digabungkan dengan tanggung jawab pengasuhan anak, pemasukan yang dihasilkan biasanya secara substansial lebih rendah ketimbang yang dihasilkan oleh laki-laki dalam kelas yang sama. Keadaan ini diperburuk oleh kenyataan bahwa perempuan masih menerima jumlah uang yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama di berbagai belahan dunia. Bahkan petugas sensus pun diinstruksikan untuk tidak memasukkan kerja rumah tangga perempuan dalam formulir sensusnya, pesannya jelas “jangan menghitung kerja perempuan karena kerja perempuan tidak diperhitungkan”. Kerja yang dilakukan perempuan kadang-kadang “tidak

tampak” karena itu tidak terekam secara statistik. Kerja perempuan lebih dipandang menghidupi ketimbang mendapatkan penghasilan.<sup>16</sup>

Seperti halnya di India yang sangat mengutamakan anak laki-laki di bandingkan anak perempuan. Keutamaan anak laki-laki ini tercermin dalam banyak hal, seperti maraknya pertumbuhan klinik yang menawarkan *amniocentesis* untuk tes jenis kelamin, dan pengguguran kandungan terhadap janin perempuan yang tidak diinginkan.

Pada tahun 1980an penggunaan *amniocentesis* untuk menentukan jenis kelamin sangat populer di pusat-pusat urban India. Dengan diiklankan sebagai “pelayanan kemanusiaan bagi kaum perempuan yang tidak menginginkan anak perempuan lagi”, diperkirakan 78.000 janin perempuan digugurkan antara tahun 1978 dan 1982. Gerakan perempuan di India dengan cepat menanggapi, karena melihat adanya ancaman serius dari kecenderungan yang sedang berkembang--yang muncul sebagai perluasan atas pilihan reproduktif perempuan--terhadap status kaum perempuan India. Mereka memulai berbicara kembali di media, menegaskan bahwa pilihan jenis kelamin merupakan bentuk lain dari penindasan, dan bahwa dengan “kedok sebuah pilihan, kita memang ingin memperburuk penindasan kita sendiri”. Analisis yang berkembang dari gerakan perempuan itu juga mengaitkan kelas, ras dan jenis kelamin dalam penolakannya terhadap pelembagaan keutamaan anak laki-laki yang semakin berkembang. Kelompok jurnalis, organisasi perempuan,

---

<sup>16</sup> Julia C. Mosse. *Gender & Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2007. Hal. 56-59.

dan organisasi kesehatan sukarela, ahli hukum dan dokter, membentuk *Forum Against Sex Determination and Sex-preselection Techniques* (Forum Melawan Determinasi Jenis Kelamin dan Teknik Pra-seleksi Jenis Kelamin) dan mengorganisir kampanye yang efektif dengan menggunakan film, pameran, pertemuan umum, dan ulasan televisi guna menyampaikan implikasi sosial dari tes tersebut. Mereka mengorganisir barisan penjaga di depan rumah sakit yang melakukan tes tersebut dan membawa ribuan poster. Sebagian aksi yang amat sukses tercatat demonstrasi yang dilakukan oleh orang tua dengan anak perempuannya; dan kegiatan yang dilakukan oleh pelajar, yang menolak pandangan bahwa anak perempuan kurang berharga dibandingkan anak laki-laki. Ketika tekanan disuarakan, Pemerintah Maharashtra terpaksa mengharamkan praktik itu di negara bagian tersebut.<sup>17</sup>

Demikian juga *Movimento das Mulheres Trabalhadoras do Brejo Paraibano* (MMTBP--Organisasi Perempuan yang Bekerja), organisasi yang berkiprah di Brejo, Paraíba, daerah timur laut Brazil ini pada tahun 1986 dapat mengadakan *Congress of Women Workers* (Kongres Pekerja Perempuan) yang pertama di distrik itu. Kongres itu mengumpulkan 140 perempuan, pembantu rumah tangga, tukang cuci, pekerja pabrik, guru dan pekerja desa, dengan tujuan utama menghasilkan dokumen tentang hak-hak perempuan atas kesempatan yang sama dalam hak-hak dasar buruh. Kongres tersebut juga mengajukan usulan untuk dimasukkan

---

<sup>17</sup> Patel V. "Campaign Against amniocentesis". Dalam *In Search of Our Bodies: A feminist view on women health and reproduction in India*. Bombay: Shakti. Hal. 70-74.

dalam konstitusi Brazil yang baru, seperti pensiun bagi perempuan yang berusia 65 tahun dan pengakuan penuh terhadap perempuan sebagai pekerja dengan penyediaan hak-hak dasar seperti gaji minimum dan cuti melahirkan. Kendati negosiasi untuk konstitusi baru relatif gagal, prosenya telah memungkinkan kaum perempuan memunculkan isu ini di pusat gerakan serikat itu. Proses itu juga menawari mereka kanvas yang lebih luas yang bisa menafsirkan hak mereka sebagai pekerja. Ketika gerakan itu makin berkembang dari sisi jumlah dan keyakinan, gerakan tersebut memperluas analisisnya tentang isu yang mempengaruhi perempuan, dengan menggunakan gender sebagai fokus utamanya. Kini MMTBP menyentuh kehidupan, dan menawarkan bantuan kepada lebih dari 2.000 perempuan. MMTBP telah berkembang menjadi gerakan perubahan sosial yang mencakup semua pengalaman perempuan; perjuangan kelas dan semua hak-hak buruh yang dikaitkan dengan lingkup pribadi dengan menitikberatkan perhatian kepada gender sebagai konteks yang mencakup semuanya.<sup>18</sup>

Banyak kelompok-kelompok/organisasi-organisasi perempuan di dunia, baik milik swasta maupun pemerintah, seperti *The Association of African Women for Research and Development* (AAWORD) di Africa, *Development Alternatives with Women for a New Era* (DAWN) di India Selatan, *Self Employed Women's Association* (SEWA) di Ahmedabad, *Gender and Development Unit* (GADU) di Oxford, *The Centre for*

---

<sup>18</sup> Julia C. Mosse. *Gender & Pembangunan*. *Op.cit.* Hal. 134-136.

*Information and Women's Development* (CIDEM) di La Paz, Peru, CENSEL (*Centro de Servicios Legales para la Mujer*) salah satu organisasi yang menawarkan bantuan hukum kepada perempuan di Republik Dominika, NGOs dan masih banyak lagi lainnya. dimana banyak kasus-kasus yang ditangani mereka, seperti kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual, kekerasan di dalam rumah tangga, hak dalam warisan (hukum waris), bedah kosmetik/operasi terhadap bagian-bagian tubuh dari perempuan untuk memperoleh tubuh yang ideal, pembagian kerja secara seksual dan nilai kerja ekonomi perempuan, kultur bekerja, jaminan kerja, kesempatan hidup yang sama antara laki-laki dan perempuan, kesehatan, kesempatan yang sama dalam pendidikan, masalah-masalah pembangunan, dan masih banyak lagi lainnya. Dari sekian banyak kasus-kasus tersebut, beberapa diantaranya berhasil diselesaikan dengan baik dan terbukti sangat efektif. Mulai dari dicetuskannya kebijakan, peraturan maupun perundang-undangan hingga pada tingkatan mensosialisasikannya dan mengubah persepsi masyarakat (baik kepada kaum perempuan itu sendiri maupun kepada kaum laki-laki) tentang perempuan, pemberdayaan, pengembangan potensi, pendidikan dan pelatihan terhadap perempuan serta penyediaan advokasi bagi perempuan dan pelbagai kegiatan lainnya untuk memperbaiki keadaannya sekarang. Baik yang sifatnya berskala lokal, nasional bahkan internasional.

Sistem hukum di seluruh dunia mendukung dan memperkuat perbedaan gender. Bagian 3 konstitusi India, misalnya, meletakkan hak-hak dasar tertentu. Setiap warga negara dijamin persamaannya di depan hukum, diskriminasi dilarang. Tetapi konstitusi memuat sengketa di ekornya berkaitan dengan perempuan. Ini menjadi bentuk “Kebebasan Beragama” menurut pasal 25, yang berbunyi “Tunduk kepada tatanan umum, moralitas dan kesehatan... semua orang sama-sama memiliki hak dan kebebasan hati nurani dan hak menyatakan, melaksanakan dan mendakwahkan agama secara bebas”. Bagian konstitusi ini mengandung makna bahwa perempuan Hindu, Islam, Parsi, Kristen Yahudi dan perempuan suku tunduk kepada hukum personal masing-masing komunitasnya. Hukum personal merupakan kawasan yang amat mempengaruhi perempuan, yang menyentuh masalah-masalah seperti hak atas kekayaan, pemeliharaan, perceraian, pengangkatan anak, perwalian anak dan poligami. Ini seolah-olah hukum berkata kepada perempuan “Kami memberimu hak persamaan, tetapi agamamu mengatur sebaliknya, kami tidak bisa campur tangan”.

Menurut *Development Alternatives with Women for a New Era* (DAWN) yang telah mengidentifikasi sekurang-kurangnya ada enam macam jenis/tipe organisasi perempuan yang berbeda mulai dari yang sangat tradisional hingga organisasi dengan analisis dan agenda feminis khusus. Pertama ada organisasi perempuan tradisional, seringkali sudah lama berdiri (Institut Perempuan [*the Women Institute*] di Inggris).

Organisasi semacam ini cenderung berkuat di seputar peran gender tradisional, meski membuat prestasi penting dalam bidang pendidikan perempuan, kesehatan dan pelayanan- pelayanan terkait. Organisasi tersebut sebagian besar juga didukung oleh perempuan kelas menengah, dan mungkin memiliki pendekatan “patronase”, pendekatan “kesejahteraan”, kepada perempuan pekerja yang lebih miskin. Kekuatannya terletak dalam akses mereka terhadap sumber daya dan pembuat keputusan, kendati mereka mungkin tidak selalu mengeksploitasi jalinan ini. Kedua, ada kelompok yang berafiliasi dengan parta politik, seperti sayap perempuan ANC di Afrika Selatan. Organisasi semacam ini mungkin memiliki persoalan dalam menegaskan agendanya sendiri, yang bersumber dari kekhawatirannya dianggap memecah belah. Ketiga ada organisasi yang berbasis pekerja, termasuk serikat buruh dalam sektor formal, dan organisasi wiraswasta perempuan miskin yang jumlahnya semakin banyak, seperti SEWA di India. Mereka biasanya mulia dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah seperti kondisi pekerjaan serta tersedianya kredit, tetapi kemudian melangkah ke agenda feminis yang lebih eksplisit, seperti pengasuhan anak, pelecehan seksual di tempat kerja dan sebagainya.

Tipe organisasi keempat berkibar dalam tahun-tahun sejak Dasawarsa Perempuan PBB dilancarkan, yang muncul dari pendanaan proyek; koperasi kredit. Kebanyakan organisasi semacam ini mengalami kelemahan struktural dan pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*).

Jenis organisasi yang lebih kuat adalah jenis kelima, organisasi akar rumput (*grassroots*), yang cenderung melihat isu-isu seperti kesehatan, pemberantasan buta huruf, kekerasan, hukum, dan persoalan politik yang lebih luas, seringkali dari prespektif feminis. Di satu sisi, kelemahan kelompok semacam itu adalah karena bersandar kepada basis sumber daya yang tidak memadai, dan dalam kenyataannya mereka cenderung memiliki keanggotaan dan prespektif kelas menengah, kelas perkotaan. Dan jenis organisasi keenam adalah organisasi penelitian dan sumber daya, yang muncul dalam tahun-tahun terakhir. Kelompok seperti itu benar-benar memiliki kesempatan mempengaruhi perdebatan kebijakan umum dan memberi masukan kepada kerja lembaga dan pemerintah pemberi dana internasional. Di samping keenam jenis organisasi ini ada sebarisan organisasi lainnya yang tidak mudah diklasifikasikan. Seperti kamp-kamp perdamaian, atau organisasi pelindung yang mempertautkan perempuan yang bekerja dalam sektor-sektor yang berbeda, termasuk disini, seperti organisasi keagamaan dan kultural perempuan. Bentuk organisasi perempuan penting lainnya adalah organisasi yang hadir untuk melawan penindasan dan kesemena-menaan terhadap hak azasi manusia.

Begitupun Negara Indonesia jika dilihat dari aspek sosial budayanya yang kini berpenduduk kurang lebih 238 juta adalah merupakan suatu organisasi sosial, terdiri dari kelompok-kelompok manusia yang terus-menerus mengembangkan norma sosial yang meliputi kehidupan normatif, kedudukan sosial, kelompok asosiasi, dan institusi.

Penduduk yang hidup berpencaran yang sebagian besar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua terdiri dari berbagai tingkatan pengetahuan, pendidikan dan memegang jabatan serta pekerjaan beraneka ragam, sebagian besar hidup di daerah pedesaan. Dan dari seluruh penduduk tersebut perlulah kiranya diingat bahwa separuh dari mereka terdiri dari kaum perempuan. Dan dari separuh jumlah penduduk tersebut, puluhan juta juga terdiri dari tenaga kerja perempuan, baik mereka bekerja pada bidang pemerintahan, bidang swasta maupun sebagai ibu-ibu pengurus rumah tangga.

Walaupun mulai permulaan tahun 1900 kaum perempuan telah mengadakan perkumpulan-perkumpulan pergerakan, namun peranan kaum perempuan yang pada hakikatnya mempunyai potensi cukup tinggi tersebut belum memadai. perkumpulan-perkumpulan perempuan ini pada umumnya masih bersifat kedaerahan (Jawa) atau berdasarkan agama ('Aisyiyah, Wanita Katolik). Maka baru pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta diadakan Kongres Perempuan Indonesia nasional yang pertama, yang sebelumnya telah dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta, yang berkumandang di seluruh tanah air dan membangkitkan semangat persatuan rakyat. Kongres tersebut berhasil membentuk suatu federasi bernama Persatoean Perempoean Indonesia (PPI), yang merupakan federasi organisasi-organisasi perempuan Indonesia. Pada tahun berikutnya nama federasi ini diubah menjadi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII). Maka semenjak

itulah kaum perempuan bersama-sama dengan kaum laki-laki bahu-membahu berjuang bersama untuk kejayaan nusa dan bangsa, tidak pernah absen pada tahap perjuangan.<sup>19</sup>

Dalam perjalanannya perjuangan kaum perempuan banyak mendapatkan guncangan dari berbagai pihak. Mulai dari perbedaan-perbedaan pandangan dari organisasi-organisasi yang tergabung dalam kongres, hingga tekanan-tekanan organisasi lain dari luar yang tidak menyukai gerakan kaum perempuan tersebut.

Kongres Perempuan nasional berikutnya diadakan di Jakarta (1935), Bandung (1938), dan Semarang (1941), dalam mana perjuangan nasional berangsur-angsur semakin menonjol. Dalam kongres 1935 terbentuklah Kongres Perempuan Indonesia (KPI), dan dengan demikian PPII dibubarkan. Perhatian tertentu ditujukan kepada kaum perempuan dan golongan miskin, tetapi keanggotaan masih berasal dari lapisan atas, dan tuntutan yang disuarakan pun sebagian besar masih diarahkan pada kepentingan kaum perempuan golongan atas.

Walaupun sejak 1930 gerakan nasional berkembang pesat, dan terlihat pula tanda-tanda tumbuhnya nasionalisme di dalam gerakan perempuan, namun sampai awal pendudukan Jepang tahun 1942, selain kaum perempuan Serikat Rakyat, Istri Sedar adalah satu-satunya organisasi yang secara terbuka dan sistematis mengecam politik pemerintah kolonial Belanda, dan memberi perhatian pada perjuangan

---

<sup>19</sup> Hardjito Notopuro, SH. Peranan Wanita Dalam Masa Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984. Hal. 14-15.

anti-kapitalisme. Misalnya, pada kongresnya tahun 1932, dalam mana Sukarno yang di kemudian hari menjadi presiden mengucapkan pidatonya yang berjudul "Gerakan Politik dan Emansipasi Wanita," Isteri Sedar menyatakan bahwa perempuan Indonesia harus memainkan peranan aktif di bidang politik oleh karena "hanya Indonesia yang merdeka oleh usaha besar-besaran kaum laki-laki dan wanita yang bersatu padu yang akan sanggup memberikan persamaan hak dan tindakan kepada rakyat Indonesia." Isteri Sedar juga menyatakan bahwa nasib kaum perempuan proletar harus diperbaiki.<sup>20</sup>

Semasa pendudukan Jepang semua organisasi perempuan Indonesia dilarang. Hanya satu organisasi perempuan di bawah kekuasaan Jepang yang diizinkan hidup, yaitu Fujinkai. Kegiatan organisasi ini adalah di bidang pemberantasan buta huruf dan berbagai pekerjaan sosial. Mereka yang giat di dalam Fujinkai ini terutama adalah para istri pegawai negeri. Seperti halnya organisasi-organisasi perempuan sekarang, Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi, Fujinkai melakukan kegiatan dalam hirarki yang sejalan dengan hirarki suami. Di kalangan kaum perempuan, para anggota Fujinkai harus mempropagandakan cita-cita Jepang tentang "Asia Raya" di bawah pimpinan Dai Nippon. Fujinkai adalah salah satu di antara organ-organ yang digunakan Jepang untuk mengerahkan rakyat Indonesia bekerja "suka-rela" demi kemenangan "perang suci" mereka. Gerakan nasional, termasuk beberapa organisasi perempuan, antara lain

---

<sup>20</sup> Artikel Gadis Arivia. *Soekarno dan Gerakan Perempuan: Kepentingan Bangsa Versus Kepentingan Perempuan*. Jakarta. 2000. Hal. 2-3.

Gerakan Wanita Sosialis (GWS), sebagian bergerak di bawah tanah. Banyak kaum nasionalis, termasuk yang perempuan, ditangkap dan dibunuh. Sesudah Jepang kalah, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Belanda berusaha merebut kembali kepulauan Indonesia. Perang kemerdekaan yang sengit terjadi, yang berkesudahan dengan kekalahan Belanda pada tahun 1949.

Sejak paruh kedua dasa-warsa 1950-an panggung politik Indonesia menjadi semakin dikuasai oleh ketegangan antara tiga golongan terkemuka: Angkatan Darat, organisasi-organisasi Islam, dan golongan komunis. Gerakan Wanita Indonesia atau GERWANI adalah organisasi perempuan yang paling besar dan paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. GERWANI berasal dari Gerakan Wanita Sedar (GERWIS) yang didirikan tahun 1950 dengan anggota hanya 500 orang perempuan. Para anggota ini pada umumnya berpendidikan tinggi dan berkesadaran politik. Dari segi ideologi, organisasi ini merupakan kelanjutan dari Isteri Sedar dulu. Kaum perempuan dalam GERWIS umumnya dari generasi yang lebih muda, tetapi mereka punya hubungan dengan perempuan yang bergabung dalam Isteri Sedar.<sup>21</sup>

Kampanye GERWANI tertuju pada beberapa masalah perkosaan di Jawa Barat dan Bali. Organisasi ini juga melakukan agitasi untuk memberikan dukungan kepada lurah-lurah perempuan. Beberapa orang perempuan telah terpilih menjadi lurah, tetapi tidak bisa menjalankan

---

<sup>21</sup> Saskia E. Wieringa. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya. 1999. Hal. 28.

jabatan karena hukum kolonial melarang kaum perempuan menduduki jabatan semacam ini.

Tahun 1961 anggota organisasi mencapai lebih dari satu juta orang. Cabang-cabang didirikan di seluruh penjuru negeri. Kaum perempuan tertarik pada organisasi ini semata-mata oleh karena kegiatannya yang menyangkut kebutuhan sehari-hari mereka. Warung-warung koperasi dan koperasi simpan-pinjam kecil-kecilan didirikan. Perempuan tani dan buruh disokong dalam sengketa mereka dengan tuan tanah atau majikan pabrik tempat mereka bekerja. Taman kanak-kanak diselenggarakan di pasar-pasar, perkebunan-perkebunan, kampung-kampung. Kaum perempuan dididik untuk menjadi guru pada sekolah-sekolah ini. Dibuka pula badan-badan penyuluh perkawinan untuk membantu kaum perempuan yang menghadapi masalah perkawinan. Kursus-kursus kader dibuka pada berbagai tingkat organisasi, dan dalam kursus-kursus ini digunakan buku-buku tulisan Friedrich Engels, August Bebel, Clara Zetkin, dan Sukarno. Pada kesempatan ini juga diajarkan keterampilan teknis, misalnya tata buku dan manajemen. Hal penting lain yang diajarkan adalah sejarah gerakan perempuan Indonesia.

Sudah sejak awalnya GERWANI sangat giat dalam membantu peningkatan kesadaran perempuan tani, bekerja-sama dengan bagian perempuan BTI. Pada tahun 1961 diselenggarakan seminar khusus untuk membahas bersama persoalan mereka. Belakangan GERWANI juga membantu aksi-aksi sepihak pendudukan tanah yang dilancarkan oleh

BTI, dan menuntut agar hak atas tanah juga diberikan kepada kaum perempuan.

Di samping kegiatannya di tengah-tengah perempuan tani, GERWANI juga melakukan serangkaian kegiatan lain yang menarik. Di antaranya adalah kampanye pemberantasan buta huruf yang dimulai tahun 1955, perubahan undang-undang perkawinan yang lebih demokratis, menuntut hukuman yang berat untuk perkosaan dan penculikan, dan kegiatan-kegiatan sosial-ekonomi untuk kaum tani dan buruh perempuan. Para aktivis GERWANI melakukan kegiatan besar-besaran pemberantasan buta huruf di kalangan perempuan, sekaligus mendidik para peserta mengenai masalah-masalah politik yang hangat pada masanya, termasuk masalah-masalah perempuan. Bersama dengan kaum perempuan dari organisasi-organisasi lain, mereka saling membantu menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, baik di tingkat kampung, kota, maupun provinsi, mengenai soal-soal seperti kesejahteraan keluarga, kesehatan, kebersihan, dan juga soal-soal yang lebih bersifat "feminis" seperti pelacuran, perkawinan anak-anak, dan perdagangan perempuan. Disediakan bantuan hukum, juga bantuan untuk korban banjir dan bencana alam lainnya.

Sejarah yang panjang tentang perjuangan gerakan perempuan terputus sejak 1 Oktober 1965 yang menandai awal berdirinya rezim Orde Baru. Rezim ini melakukan pemberangusan dan pelumpuhan terhadap organisasi-organisasi perempuan beserta seluruh organisasi independen

lainnya. Rezim Orde Baru mendukung habis-habisan kapitalisme yang berkembang dengan cara-cara yang sangat kejam, penuh dengan perampasan tanah petani, penggusuran pemukiman kaum miskin, penindasan dan penghisapan kaum buruh, dan berbagai bentuk kekerasan oleh aparat sipil maupun militer.

Gerakan perempuan yang kritis di Indonesia, tidak berkembang pada zaman Orde Baru. Mitos yang dikembangkan rezim Orde Baru saat itu mengarahkan peningkatan kualitas perempuan hanya sebagai istri. Ini ditunjukkan oleh berbagai organisasi perempuan bentukan pemerintah saat itu seperti PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Dharma Wanita bagi istri pegawai negeri dan Dharma Pertiwi bagi istri yang suaminya bekerja di salah satu cabang angkatan bersenjata.<sup>22</sup> Sebagian besar organisasi perempuan di masa orde baru lahir sebagai tanggapan atas hegemoni dan dominasi negara terhadap perempuan. Karena dalam prakteknya seluruh organisasi perempuan yang ada diawasi dengan ketat, dan mutlak harus menjalankan politik pemerintah.

KOWANI pada tingkat pusat masih merupakan organisasi payung bagi semua organisasi perempuan. KOWANI terdiri atas- dua macam organisasi perempuan: "independen" seperti PERWARI, Aisyah, dan Wanita Katolik dan organisasi-organisasi perempuan istri pegawai. Oleh karena tiap-tiap departemen pemerintah punya organisasi perempuan sendiri, maka karena jumlahnya, organisasi perempuan istri pegawai ini

---

<sup>22</sup> A. E. Priyono, Stanley Adi Prasetyo, Olle Tornqist, *Gerakan Pro Demokrasi di Indonesia Pasca Soeharto*, Jakarta: DEMOS, 2003, hal. 391.

mendominasi KOWANI. Karena mereka juga mendapat bantuan negara, baik politik maupun praktis (misalnya kemudahan transpor, kantor, keuangan, dan lain-lain), maka ini berarti pemerintah menguasai hampir seluruh masalah yang berkaitan dengan organisasi perempuan.

Banyak usaha yang telah dilakukan untuk mengangkat posisi perempuan, salah satunya melalui organisasi sosial perempuan sebagai gerakan perempuan untuk pembebasannya dari segala ketertindasan dan ketidakadilan. Dengan membangun organisasi perempuan di semua teritori, diharapkan perempuan dari berbagai kalangan masyarakat dapat memahami ataupun menyadari penyebab ketertindasannya kemudian ikut serta memperjuangkan hak – haknya. Sehingga dapat mendefinisikan kebutuhan dan kepentingan gender “praktis” dan “strategis”. Kebutuhan dan kepentingan gender praktis adalah kebutuhan gender untuk mempertahankan dan bahkan memperkuat pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin serta kepentingan gender mengakui kenyataan bahwa kepentingan perempuan boleh jadi banyak ditentukan oleh posisi sosial dan identitas etnisnya ia adalah seorang perempuan dan kepentingan yang sama-sama dimiliki perempuan berdasarkan kenyataan bahwa mereka adalah perempuan. Cara yang paling bermanfaat dalam melihat kepentingan gender perempuan adalah dengan melakukan perbedaan antara memperbaiki sulitnya kondisi yang setiap hari dihadapi oleh perempuan--dan menyelesaikan masalah struktural mendasar yang menyebabkan kondisi tersebut.

Definisi kepentingan dan kebutuhan gender strategis, sejauh berkaitan dengan perubahan jangka panjang. Kepentingan itu menunjuk kepada organisasi masyarakat alternatif, yang lebih adil dan lebih memuaskan berkenaan dengan hubungan laki-laki dan perempuan, yang ditujukan untuk mengubah hubungan kekuasaan yang ada antara laki-laki dan perempuan yang menyusun semua kawasan kehidupan.<sup>23</sup> Namun, yang terpentingnya lagi adalah semua pemberdayaan mengandung makna bahwa model perubahan harus dihasilkan oleh perempuan itu sendiri bukan didiktekan maupun diarahkan oleh pihak-pihak lain serta perubahan tersebut tidak bermaksud untuk balas dendam bahkan menindas kaum lainnya.

- **Gerakan Perempuan**

Dari apa yang telah dijelaskan mengenai organisasi perempuan diatas, sangat sukar mendefinisikan secara komprehensif tentang gerakan perempuan, karena gerakan perempuan tidak pernah bicara dalam satu bahasa. Definisi yang luas lebih tepat untuk bisa menangkap heterogenitas, pluralitas dan kompleksitasnya. Gerakan perempuan dapat dilihat sebagai spektrum menyeluruh dari perbuatan individu atau kolektif secara sadar dan tidak sadar, kegiatan, kelompok atau organisasi yang memperhatikan terhadap berkurangnya berbagai aspek subordinasi gender yang dipandang sebagai berjalan

---

<sup>23</sup> Julia C. Mosse. *Gender & Pembangunan. Op.cit.* Hal. 214-216.

dengan penindasan lainnya, seperti misalnya yang didasarkan atas kelas, ras, etnik, umur dan seks.<sup>24</sup>

Menurut *Melluci*, gerakan perempuan bisa berupa jaringan kerja yang tak nampak dari kelompok kecil yang timbul ditengah kehidupan sehari-hari, di dalam "laboratoriumnya" yang tak nampak itu, gerakan akan mempertanyakan atau menentang aturan hidup sehari-hari.<sup>25</sup>

Gerakan perempuan seperti gerakan feminisme memandang perempuan sampai saat ini selalu dalam posisi tertindas, subordinat secara sistem dan terpenjara secara ideologis. Kelahiran gerakan pembebasan perempuan merefleksikan perubahan struktural dalam kehidupan sebagian besar perempuan. Gerakan feminis berhasil membangun karakter sosial atas situasi kaum perempuan dan mendapatkan pengakuan gender perempuan. Gerakan pembebasan perempuan merupakan gerakan yang heterogen dengan berbagai teori dan pandangan politik yang berbeda.<sup>26</sup>

Kalau gerakan perempuan yang terjadi pada akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-20 banyak memusatkan perhatiannya pada upaya memperoleh ruang publik yang lebih luas dengan keterlibatan perempuan di dalam wilayah politik dan ekonomi, maka belakangan ini tuntutan yang memuncak dan meluas adalah penghilangan batasan

---

<sup>24</sup> Saskia E. Wieringa. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, *op. cit.*, hal. 75.

<sup>25</sup> *Ibid.* Hal. 77.

<sup>26</sup> Ernawaty, Sasongko. *Feminisme dan Sosialisme* (diterjemahkan dari tulisan Lisa McDonald "Feminism and socialism : Putting The Pieces Together"). Australia: Resistance Book. 2001. Hal. 41- 42.

wilayah publik dan pribadi dalam masalah perempuan. Gerakan perempuan yang terjadi saat ini lebih kritis memandang asal-usul munculnya penindasan terhadap mereka.

Kaum sosialis memandang perlunya gerakan perempuan yang bukan bertujuan memusuhi laki-laki. Lebih dari itu, gerakan perempuan mesti lebih kritis memandang asal-usul penindasan terhadap perempuan dan kaum tertindas lainnya. Karena kaum perempuan dan laki-laki sebagai kelas pekerja, sejatinya berada dalam penindasan yang sama.

Perempuan harus bertarung dengan kemiskinan sebagai buruh pabrik, buruh migran, buruh tani dan buruh kebun, juga sebagai pembantu rumah tangga dan pekerja seks. Mereka semua memiliki karakter sosial yang sama yaitu miskin, berpendidikan rendah dan dibayar murah. Ketiga poin di atas merupakan bentuk kekerasan yang paling mendasar terhadap perempuan yang berakar pada diskriminasi secara ekonomi politik dan sosial terhadap perempuan yang berwatak patriarki.<sup>27</sup>

## **2. Artikulasi Kepentingan Perempuan**

Pasca keruntuhan Orde Baru kaum perempuan Indonesia melalui organisasi perempuan yang berkedudukan di daerah-daerah sudah lebih kritis dengan mulai “melirik” Pemilihan Umum Kepala Daerah

---

<sup>27</sup> Saskia E. Wieringa, *loc. cit.*

(Pemilukada) sebagai salah satu ajang untuk mewujudkan pengarusutamaan gender (PUG). Momen-momen Pemilukada ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh organisasi perempuan dengan mengartikulasikan kepentingan perempuan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender demi terciptanya kesetaraan dan keadilan gender dalam segala bidang kehidupan, baik bagi laki-laki maupun perempuan demi kemajuan bangsa dan negara mengingat besarnya *power*, *authority* dan peran yang sangat penting dan strategis yang dimiliki oleh Kepala Daerah.

Artikulasi kepentingan yang paling umum di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individu kepada anggota dewan kota, parlemen, pejabat pemerintah atau dalam masyarakat tradisional melalui Kepala Desa atau Ketua Suku.<sup>28</sup>

Artikulasi kepentingan adalah proses untuk merumuskan dan kemudian menyalurkan berbagai ragam pendapat, aspirasi maupun kepentingan yang ada di dalam masyarakat kepada pihak penguasa.

Artikulasi kepentingan adalah cara masyarakat mengemukakan kepentingannya kepada partai politik, dan lembaga pemerintah yang berwenang membuat keputusan atau kebijakan yang terkait dengan hajat hidupnya. Artikulasi kepentingan biasanya dilakukan dengan membentuk kelompok kepentingan (*interest group*) . Artinya, anggota masyarakat akan membentuk kelompok berdasarkan kesamaan kepentingan tuntutan

---

<sup>28</sup> A. Rahman H.I. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2007. Hal. 85.

untuk kesejahteraan dirinya. Kaum perempuan membentuk organisasi perempuan untuk memperjuangkan keluarnya kebijakan tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) serta pengarusutamaan gender (PUG).

Peranan laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh norma sosial dan nilai sosial budaya masyarakat disebut peran gender. Ini artinya, peran gender tidak ditentukan oleh perbedaan kelamin seperti halnya peran kodrat. Peranan adalah hak dan kewajiban yang dijalankan oleh seseorang, laki-laki atau perempuan pada kedudukan (posisi) tertentu. Jadi, setiap kedudukan dilengkapi dengan seperangkat peranan. Semakin tinggi kedudukan seseorang semakin tinggi pula peranannya, sebaliknya semakin rendah kedudukan seseorang semakin rendah pula peranan yang dapat dijalankannya.

Laki-laki dan perempuan merupakan dua insan yang berbeda, tetapi bukan untuk dibeda-bedakan. Itulah makanya, di dalam UUD RI 1945 dan GBHN 1993, di antaranya diamanatkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa perempuan mempunyai status yang lebih rendah dan mengalami ketertinggalan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, baik sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai penikmat hasil pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan peranan perempuan yang berwawasan gender sebagai bagian integral dari

pembangunan nasional, merupakan upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender atau kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki dengan perempuan. Artinya, laki-laki dan perempuan mempunyai hak, kewajiban, kedudukan-peranan dan kesempatan yang sama dalam pembangunan, baik pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. laki-laki dan perempuan sama-sama merupakan tenaga yang berpotensi tinggi. Mengikutsertakan laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan, berarti merupakan tindakan yang efisien dan efektif.

Perbedaan gender (*gender differences*) pada proses berikutnya melahirkan peran gender (*gender role*) dan dianggap tidak menimbulkan masalah, maka tak perlu digugat. Jadi kalau secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan dan menyusui dan mempunyai peran gender sebagai perawat, pengasuh dan pendidik anak, sesungguhnya tidak ada masalah dan tidak perlu digugat. Akan tetapi yang menjadi masalah dan perlu digugat adalah struktur “ketidakadilan” yang ditimbulkan oleh *peran gender* dan *perbedaan gender* tersebut. Seperti dalam uraian berikut: *Pertama*, terjadi marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan. Meskipun tidak setiap marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan gender, namun yang dipersoalkan adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender. Misalnya banyak perempuan desa yang tersingkirkan dan menjadi miskin akibat dari program pertanian

Revolusi Hijau yang hanya menfokuskan pada petani laki-laki. Hal ini karena asumsinya bahwa petani itu identik dengan petani laki-laki. Atas dasar itu banyak petani perempuan tergusur dari sawah dan pertanian, bersamaan dengan tergusurnya *ani-ani*, kredit untuk petani yang artinya petani laki-laki, serta pelatihan pertanian yang hanya ditujukan kepada petani laki-laki. Jadi yang dipermasalahkan adalah pemiskinan petani perempuan akibat dari bias gender. Di luar dunia pertanian, banyak sekali pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan seperti ‘guru taman kanak-kanak’ atau ‘sekretaris’, yang dinilai lebih rendah dibandingkan pekerjaan laki-laki dan seringkali berpengaruh terhadap perbedaan gaji antara kedua jenis pekerjaan tersebut.

*Kedua*, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, umumnya kepada kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat mapun negara, banyak kebijakan dibuat tanpa ‘menganggap penting’ kaum perempuan. Misalnya anggapan karena perempuan toh nantinya akan ke dapur, mengapa harus sekolah tinggi-tinggi, adalah bentuk subordinasi yang dimaksud. Bentuk dan mekanisme proses subordinasi tersebut dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat berbeda. Misalnya, karena anggapan bahwa perempuan memiliki pembawaan “emosional” sehingga dianggap tidak tepat tampil sebagai pemimpin partai atau menjadi manajer, adalah proses subordinasi dan diskriminalisasi berdasarkan gender.

*Ketiga*, adalah pelabelan negatif (stereotype) terhadap jenis kelamin tertentu, dan akibat dari stereotype itu terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya. Dalam masyarakat, banyak sekali stereotype yang diletakkan kepada kaum perempuan yang berakibat membatasi, menyulitkan, memiskinkan dan merugikan kaum perempuan. Karena adanya keyakinan masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah (*bread winner*) misalnya, maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai ‘tambahan’ dan oleh karenanya boleh saja dibayar lebih rendah. Itulah maknanya dalam keluarga, sopir (dianggap pekerjaan laki-laki) sering dibayar lebih tinggi dibanding pembantu rumah tangga (peran gender perempuan), meski tidak ada yang bisa menjamin bahwa pekerjaan sopir lebih berat dan sulit dibanding memasak dan mencuci.

*Keempat*, kekerasan (*violence*) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, karena perbedaan gender. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai kekerasan dalam bentuk lebih halus seperti pelecehan (*sexual harassment*) dan penciptaan ketergantungan. Banyak sekali kekerasan terhadap perempuan yang terjadi karena adanya stereotype gender. Bahwa karena perbedaan gender dan sosialisasi gender yang amat lama, sehingga mengakibatkan kaum perempuan secara fisik lemah dan laki-laki umumnya lebih kuat maka hal itu tidak menimbulkan masalah sepanjang anggapan lemahnya perempuan tersebut mendorong laki-laki boleh dan bisa seenaknya

memukul dan memperkosa perempuan. Banyak terjadi pemerkosaan justru bukan karena unsur kecantikan, namun karena kekuasaan dan stereotipe gender yang diletakkan kepada kaum perempuan.

*Kelima*, karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, maka banya perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama (*burden*). Dengan kata lain, *peran gender* perempuan mengelola, menjaga dan memelihara kerapian tersebut, telah mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik. Sosialisasi peran gender tersebut menimbulkan rasa bersalah dalam diri perempuan jika tidak menjalankan tugas-tugas domestik tersebut. Sedangkan bagi kaum laki-laki, tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan dibanyak tradisi secara adat laki-laki dilarang terlibat dalam pekerjaan domestik. Beban kerja tersebut menjadi dua kali lipat bagi kaum perempuan yang juga bekerja diluar rumah. Selain bekerja diluar, mereka juga masih harus bertanggung jawab atas keseluruhan pekerjaan domestik. Maka hubungan antara buruh dengan istrinya berbentuk cara produksi yang feodalistik (*feudalistic mode of production*)—yakni para buruh membeli perempuan guna melayani keluarga. Namun bagi mereka yang secara ekonomi cukup, pekerjaan domestik ini kemudian dilimpahkan ke pihak lain yakni pembantu rumah tangga. Proses ini mengandung arti terjadi pemindahan marginalisasi,

subordinasi dan beban kerja (*burden*) dari istri ke para pembantu rumah tangga yang kebanyakan juga perempuan.

Semua manifestasi ketidakadilan gender tersebut saling berkaitan dan secara dialektika saling mempengaruhi. Manifestasi ketidakadilan itu “tersosialisasikan” kepada kaum laki-laki dan perempuan secara mantap, yang lambat laun akhirnya baik laki-laki maupun perempuan menjadi terbiasa dan akhirnya dipercaya bahwa peran gender itu seolah-olah merupakan kodrat. Lambat laun terciptalah suatu struktur dan sistem ketidakadilan gender yang “diterima” dan sudah tidak lagi dapat dirasakan ada sesuatu yang salah.<sup>29</sup>

Jadi, artikulasi kepentingan perempuan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan perempuan demi kesetaraan dan keadilan gender (KKG) serta pengarusutamaan gender (PUG) dalam segala bidang kehidupan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam kelompoknya sehingga dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan.

Maka dengan demikian, dalam mengartikualsikan kepentingan masyarakat, khususnya kepentingan perempuan diharapkan dapat dilakukan dengan baik dan benar oleh organisasi perempuan sesuai dengan tahapan-tahapannya serta timbulnya solidaritas yang kokoh agar dapat *tercovernya* segala kepentingan masyarakat tersebut terutama terhadap kepentingan-kepentingan yang sifatnya segera dan *urgent*,

---

<sup>29</sup> Mansour Fakih. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1996. Hal. 72-77.

sehingga dapat terwujudnya segala kepentingan tersebut sesuai hasil yang diharapkan bersama.

### **3. Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung**

Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu negara yang memakai sistem demokrasi. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilu memang sudah secara periodik berlangsung sejak awal-awal negara ini merdeka, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menyemai nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter. Setelah penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung tahun 2004 kemudian tahun 2005 diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara langsung telah mejadi salah satu batu loncatan ujian kesuksesan tahapan demokrasi di Indonesia. Meskipun sebagian masyarakat masih skeptis atas penyelenggaraan pemilu secara langsung ini.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilukada dimasukkan kedalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilukada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah pemilukada DKI Jakarta tahun 2007.

Sistem pemilihan secara langsung saat ini banyak digunakan diberbagai Negara karena dinilai lebih demokratis dibandingkan dengan sistem yang tidak langsung. Sistem pemilihan langsung ini juga dianggap lebih “representatif” karena calon kepala daerah tersebut bisa dipilih langsung oleh rakyat, sehingga dinilai sesuai dengan kehendak rakyatnya. Setidaknya ada beberapa hal yang dapat dipetik langsung dari penyelenggaraan pemilihan langsung, yakni :

- 1) Meningkatkan partisipasi politik masyarakat, di dalam kehidupan demokrasi partisipasi politik merupakan sebuah perwujudan dari hak politik rakyat. Arbi Sanit menegaskan bahwa “partisipasi politik ialah aktifitas legal warga masyarakat secara perorangan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh kepada seleksi pejabat pemerintahan dan atau kepada tingkah lakunya sebagai pejabat”.<sup>30</sup> Dengan demikian aktifitas setiap warga masyarakat dalam mempengaruhi sepak-terjang pemerintahan adalah sah, namun tentunya masih dalam rambu-rambu hukum. Pemilihan Umum adalah sebagai salah satu saluran untuk menyampaikan partisipasi politik karena melalui pemilu telah terjadi proses transmisi, dimana suara rakyat yang disalurkan melalui kemudian diijelmakan menjadi lembaga politik yaitu pemerintah. Selanjutnya rakyat menyerahkan haknya kepada pemerintah untuk berkuasa. Namun tentunya masih banyak lagi saluran partisipasi lainnya selain pemilu, dan apabila tidak

---

<sup>30</sup> Arbi Sanit. *Ormas dan Politik*. Lembaga Studi Informasi Pembangunan. Jakarta. 1995. Hal. 107.

tersedia atau dalam keadaan tertutup dapat menimbulkan instabilitas politik.

Oleh karena itu Arbi Sanit menyatakan bahwa: “apabila saluran bagi partisipasi tidak tersedia berupa partai politik, berbagai organisasi, kesempatan untuk memainkan berbagai peranan politik; dan apabila tidak dapat persesuaian paham mengenai aturan permainan diantara pemegang peran politik; maka partisipasi didalam suasana ini akan tersalur melalui cara-cara yang sering menggoncangkan kestabilan politik, seperti melalui huru-hara, dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya”.<sup>31</sup>

Permasalahan dasar yang terkait dengan partisipasi masyarakat adalah belum efektifnya pemanfaatan partisipasi ini, karena sesungguhnya bentuk partisipasi masyarakat bukan hanya sekedar menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tetapi juga ada hal lainnya. Setidaknya ada empat sasaran partisipasi politik menurut Arbi Sanit, yaitu: “mempengaruhi hasil seleksi pejabat pemerintah yang sedang diproses, mempengaruhi kebijakan yang sedang disusun, mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dan mengawasi proses pemerintahan dan politik.”<sup>32</sup>

- 2) Meningkatkan kesadaran politik masyarakat, ikut serta dalam pemilihan langsung Kepala Daerah adalah merupakan bentuk dukungan dan suatu kesadaran politik masyarakat untuk pembentukan

---

<sup>31</sup> Arbi Sanit. *Sistem Politik Indonesia Kestabilan peta Kekuatan Politik dan pembangunan*. Raja Grafindo persada. Jakarta. 2002. Hal. 5.

<sup>32</sup> Arbi Sanit. *Ormas dan Politik*. Lembaga Studi Informasi Pembangunan. Jakarta. 1995. Hal. 107.

legitimasi. Kesadaran politik ini perlu ditumbuhkan dan dikembangkan di kalangan masyarakat agar mereka mengerti dan sadar akan hak politiknya. Inisiatif atau kesadaran berpolitik dapat berawal dari warga masyarakat secara individu atau berkelompok (organisasi) atau bisa juga dari pemerintah. Hanya bedanya inisiatif dari pemerintah biasanya sebagai mobilisasi untuk kepentingan kekuasaan sedangkan inisiatif dari masyarakat bersifat spontan. Minat, perhatian dan kesadaran masyarakat dalam berpolitik adalah sebagai reaksi terhadap kenyataan yang menggugah perhatian mereka. Hal senada juga ditegaskan oleh Arbi Sanit yaitu :

Pengekangan ataupun pengukungan terhadap sebagian atau keseluruhan hak seseorang, pemanfaatan orang lain untuk mendatangkan keuntungan secara sepihak dan perlakuan yang berbeda terhadap orang yang berbeda, menggugah orang-orang yang berfikiran idealis untuk merumuskan pola hubungan manusia yang manusiawi secara ideal. Dari mereka datang kepada tiga nilai yang ideal yang membangun demokrasi sebagai suatu gagasan kehidupan yaitu kemerdekaan (*freedom*), persamaan (*equality*) dan keadilan (*justice*).

Jelas bahwa 3 (tiga) pilar yang menjadi pondasi bangunan demokrasi adalah adanya kemerdekaan, persamaan dan keadilan. Partisipasi yang dimobilisasi sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi karena cenderung dipaksakan untuk mendatangkan keuntungan bagi pihak lain. Partisipasi yang tumbuh dari inisiatif

sendiri lebih bersifat manusiawi dan sesuai konsep demokrasi. Bagi negara maju yang tingkat rasionalitas warga masyarakatnya sudah tinggi, tidak mudah terpancing untuk dimobilisasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang sengaja ingin memanfaatkannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu pula.

- 3) Memperluas akses pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan demokrasi memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat untuk menentukan oleh siapa dia dipimpin dan kepada siapa kepercayaan itu diberikan. Rakyat menjadi kunci bagi demokrasi dan esensi dari demokrasi itu adalah menyangkut hubungan antara mereka yang berkuasa (pemerintah) dengan mereka yang dikuasai. Hubungan antara mereka yang berkuasa (pemerintah) dengan mereka yang dikuasai dapat terbentuk melalui pemilihan umum, hal senada diungkapkan oleh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim yang mengatakan: “...pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dan karenanya bagi suatu negara yang menyebut dirinya negara demokrasi, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu”.<sup>33</sup>
- 4) Memperoleh legitimasi masyarakat, kepercayaan merupakan modal yang sangat besar yang diberikan anggota masyarakat kepada wakilnya. Kepercayaan yang diberikan kepada orang yang dipercaya sebagai wakil atau penguasa lazim disebut dengan legitimasi. Arbi

---

<sup>33</sup> Mashudi. *Pengertian-pengertian Mendasar tentang kedudukan hukum pemilihan umum di Indonesia menurut UUD 1945*. CV. Mandar Maju. Bandung. 1988. Hal. 329.

Sanit mengatakan bahwa: "...pemilu dimanfaatkan untuk menciptakan legitimasi bagi penguasa di satu pihak dan untuk membentuk keterwakilan anggota masyarakat pada pihak lainnya".<sup>34</sup> Namun demikian diperlukan suatu mekanisme untuk menjamin pemanfaatan kekuasaan bagi kehidupan seluruh anggota masyarakat dan satu pihak dan menjamin pengaturan hubungan saling mempercayai itu sendiri pada pihak lainnya.

- 5) Membantu terbentuknya pemerintahan yang lebih efektif, karena didukung oleh rakyat maka akan terwujud penerimaan yang luas dari masyarakat terhadap kepala daerah yang terpilih, sehingga konflik-konflik karena kontroversi pemilihan kepala daerah dapat dihindari. Sistem pemilihan langsung pada gilirannya akan menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif karena eksekutif cukup kuat dan dapat memberikan kontribusi terhadap stabilitas dalam aspek penting.
- 6) Upaya transparansi atau menghindari terjadinya praktek uang (*Money Politic*), menerapkan pemilihan langsung oleh rakyat berarti jumlah pemilihnya akan banyak tidak terbatas dalam jumlah tertentu jika dibandingkan dengan jumlah legislatif yang duduk di DPRD, maka kemungkinan akan membeli suara atau menyuap hampir mustahil. Sementara dalam sistem pemilihan tidak langsung sangat memungkinkan terjadinya *Money Politic* karena untuk memastikan

---

<sup>34</sup> Arbi Sanit. *Ormas dan Politik. Op. cit.*, Hal. 191.

kemenangan cukup didukung oleh mayoritas suara di DPRD yang jumlahnya tidak sebanyak jumlah rakyat pemilih.

- 7) Memastikan akuntabilitas kepada konstituen, dampak psikologis dari hasil pemilihan langsung adalah kemungkinan dikontrolnya seseorang yang telah dipilih untuk dimintai pertanggungjawaban bila ternyata mengingkari janji-janji yang diberikannya pada masa kampanye. Seseorang yang telah terpilih akan berupaya mewujudkan dan merealisasikan program-program yang digulirkan sesuai dengan janji-janji yang diberikan. Suatu sistem politik yang handal adalah sistem dimana baik pemerintah ataupun anggota legislatif yang dipilih berupaya secara konsisten untuk terus-menerus bertanggungjawab terhadap konstituen mereka. Para pemilih harus memiliki *power* untuk mengontrol, mempengaruhi dan menggerakkan jalannya roda pemerintahan.

## **F. Definisi Konsepsional**

### **1. Organisasi Perempuan dan Gerakan Perempuan**

Organisasi Perempuan Adalah bagaimana aktivitas-aktivitas dan upaya-upaya yang dilakukan perempuan dengan berbagai tipe, sifat dan jenis perkumpulan, kelompok maupun organisasi dalam menghimpun, menyatukan, mengakomodir, mendengarkan dan membela (advokasi) serta menyelesaikan masalah-masalah kebutuhan dan kepentingan gender “praktis” dan “strategis” yang dihadapi dan dialami kaum perempuan

dalam menuju transformasi gender sehingga terciptanya persamaan, kesejahteraan dan kedamaian serta keadilan bagi kaum laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kehidupannya.

- **Gerakan Perempuan**

Yaitu spektrum menyeluruh dari perbuatan individu atau kolektif secara sadar dan tidak sadar, kegiatan, kelompok atau organisasi yang memperhatikan terhadap masalah-masalah yang dialami dan dihadapi oleh perempuan demi terciptanya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) serta pengarusutamaan gender (PUG) dalam segala bidang kehidupan.

## **2. Artikulasi Kepentingan Perempuan**

Adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan perempuan demi kesetaraan dan keadilan gender (KKG) serta pengarusutamaan gender (PUG) dalam segala bidang kehidupan sehingga terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan.

## **3. Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung**

Pemilukada langsung merupakan salah satu sarana demokrasi bagi masyarakat untuk memilih para pemimpin-pemimpin daerah secara langsung dan mengembalikan “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokratis, yang mana dengan pemilukada langsung berarti kedaulatan rakyat yang selama ini ditangan para anggota DPRD,

sekarang berada ditangan rakyat untuk memilih pemimpin atau kepala daerah mereka.

### **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan unsur dalam penelitian yang menggambarkan bagaimana suatu variabel dapat diukur, dengan kata lain definisi operasional adalah petunjuk dalam melaksanakan kegiatan untuk mengukur suatu variabel.

Definisi operasional merupakan indikator-indikator yang dibutuhkan penulis dalam penelitian yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana upaya Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sekretaris Cabang Kulon Progo dan Srikandi Demokrasi (SRI DEM) PDIP Kulon Progo mengartikulasikan kepentingan perempuan dalam Pemiluakada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 dan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya tersebut.

Adapun indikator-indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sekretaris Cabang Kulon Progo dan Srikandi Demokrasi (SRI DEM) PDIP Kulon Progo dalam menyongsong pelaksanaan Pemiluakada 2011.
2. Upaya yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sekretaris Cabang Kulon Progo dan Srikandi Demokrasi (SRI



mempengaruhinya. Bodgan dan Tailor memberikan pengertian tentang teknik penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>35</sup>

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang terjadi yang diamati dan menggunakan logika ilmiah.

## **2. Lokasi dan Obyek Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Obyek dari penelitian ini adalah organisasi perempuan di Kabupaten Kulon Progo yaitu Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sekretariat Cabang Kulon Progo dan Srikandi Demokrasi (SRI DEM) PDIP Kulon Progo.

## **3. Data dan Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait yang dirasa mempunyai data yang dibutuhkan dalam penelitian.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi yang berupa buku-buku, jurnal, koran, majalah, dokumen-dokumen

---

<sup>35</sup> Bodgan dan Tailor. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lexy J. Moteong. Remaja Rosada Karya. Bandung. 1998. Hal. 3.

yang diperlukan dan laporan yang berkaitan dengan subyek dan obyek penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teknik atau metode pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Adalah proses memperoleh data/keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian sehingga merupakan wawancara terstruktur. Data yang diperoleh selama wawancara akan ditulis dalam buku catatan dan juga menggunakan media lainnya, seperti; *voice recorder*, dsb.

Adapun wawancara yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Kabupaten Kulon Progo.
2. Pimpinan Organisasi Srikandi Demokrasi (SRI DEM) DPC PDIP Kulon Progo.
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo.
4. Pimpinan Jaringan Masyarakat Kulon Progo (JMKP).

b. Observasi

Adapun data yang didapat melalui observasi langsung adalah terdiri dari pemerian rincian tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, juga juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal, dan proses penataan yang merupakan bagian dari pengamatan manusia yang dapat diamati.<sup>36</sup>

c. Dokumentasi

Suatu cara pengumpulan data atau informasi dengan mengumpulkan atau mempelajari data-data dokumentatif yang didapatkan dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sekretariat Cabang Kabupaten Kulon Progo, Srikandi Demokrasi (SRI DEM) DPC PDIP Kabupaten Kulon Progo. Dokumentasi ini digunakan sebagai data pelengkap atau data sekunder. Dokumentasi dapat berupa, pemberitaan media, *press release*, *advertorial*, foto kegiatan dan laporan tertulis serta dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

Referensi yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa buku, majalah, surat kabar, atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengikuti langkah-langkah analisis data yakni pengumpulan

---

<sup>36</sup> Bagong Suyanto & Sutinan. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006. Hal. 186.

data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Pengumpulan data adalah data penelitian yang akan diperoleh dengan menggunakan beberapa teknik yang sesuai dengan model interaktif, seperti: wawancara mendalam (*indepth interview*), pengamatan langsung atau observasi dan dokumentasi yang diperoleh dari penelitian.

Sedangkan reduksi data adalah proses penilaian dan pemusatan pada data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penyajian data yakni dengan menggambarkan fenomena atau keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi. Tahap terakhir adalah kesimpulan yaitu dengan menyimpulkan permasalahan penelitian yang menjadi pokok penelitian.